

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Arinkunto, Suharsimi, 2008. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (edisi keempat). Jakarta : Rineka Cipta.

Abidin, Said Zainal, 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Salemba Humanika.

Abdul Kadir, 2014. *Pengenalan Sistem Informasi (Edisi Revisi)*. Andi : Yogyakarta.

Dye, Thomas R, 1978. *Understanding Public Policy (Third Edition)*. New Jersey : Englewood Cliffs, Practice Hall.

Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik ( Edisi Kedua, Cetakan Kelima)*. Gadja Mada University : Yogyakarta.

Edward III, George C, 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarterly Press.

Hall, Janes. A, 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi ketiga. Jakarta : Salemba Empat.

Hasan, Iqbal, 2006. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta : Bumi Aksara.

Jones, Charles O, 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

Misroji, 2014. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik mengenai Depok Cyber City pada Diskominfo Kota Depok*. Tesis Universitas Esa Unggul.

Niftah Thoha, 2012. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Nugroho, Riant, 2012. *Public Policy : Teori Kebijakan-Analisis-Kebijakan-Proses* (Edisi Keempat). Jakarta : Elex Media Komputindo.

Sarjono, Hadi dan Julianita, Winda, 2011. *SPSS vs LISREL : Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. Jakarta : Salemba Empat.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung :

Alfabeta.

- Sumaryadi, I Nyoman, 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta : Citra Utama
- Subarsono, AG. 2008. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Cetakan Ketiga. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Samodra, Wibawa., Yuyun . P dan Agus P. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Singarimbun, M Sofian Effendi, 2006. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.
- Sudjana, Nana. (2005). *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Wibawa, Samoedra, 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Widodo, Joko, 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Widuri, Novia, 2012. *Analisis Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dalam Menunjang Good Government Governance (GGG) : Survei Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat*. Tesis, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Wahab, Solichin Abdul, 2006. *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (Edisi kedua)*. Jakarta : Bumi Aksara.

## **B. Jurnal / Artikel**

- Arif. M, Jan. K. Marwat, A,A & Ullah I (2009). Performance enhancement through effective communication : A Case study of the role of external and internal communication, interdisciplinary journal of contemporary research in business I, 119-146. Retrived from <http://ijcrb.webs.com/>
- Ross Levine (March 2011) : The governance of financial regulation : Reform lesson from the recent crisis.
- Wikipedia, the free encyclopedia. (2010). Budget. Artikel. [Online] Tersedia : <http://en.wikipedia.org/wiki/Budgeting>. [11 Desember 2010].
- Bean, David R. (1996). "If Public Ideas Are So Important Now, Why Are Policy Analysts So Depressed ?" *Journal of Policy Analysis and Management*.

Vol 15, No. 3 (Fall). Pp. 430-437

Amy, Douglas J. (1984). "Why Policy Analysis and Ethics Incompatible." *Journal of Policy Analysis and Management*. Vol 3, No. 4 (Summer). Pp. 573-591.

Faleyimu, O.I and O.G.E. Arowosoge.2011. Status of Forest Policy Implementation in Keduna State, Negeria. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences Volume 5 Number 8*. (<http://www.ajbasweb.comajbas2011August-2011995-1001>, diakses tanggal 10 Juni 2015).

Gootee, R.S, E.P Weber, K. Blatner, M. Carrol and D. Baumgartner. 2012.Regulation,. Knowledge Transfer, and Forestry Policy Implementation. *Sustainable Agriculture Research Volume 1. Number 1*, (<http://www.ccsenet.org/journal/index.php/sar/article/download/14543/9916>, diakses tanggal 10 Juni 2015)

### C. Dokumen

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

### D. Rujukan Elektronik

<https://pramascita.wordpress.com/2013/06/07/implementasi-kebijakan-publik/>  
Kamis, 19/02/2015. 16.00 WIB

<http://sisteminformasi.wordpress.com/2007/01/23/komponen-sistem-informasi/>  
Kamis, 19/02/2015. 16.00 WIB

<http://www.codingwear.com/blog/bacaan-106-Pengertian-Sistem-Informasi.html>  
Senin, 16/02/2015 10.00 WIB

<http://npermana.mhs.uksw.edu/2012/11/pengertian-sistem-informasi.html>  
Senin, 16/02/2015 10.00 WIB

<http://refreandi.blogspot.com/2012/07/sistem-informasi-keuangan-daerah.html>  
Senin, 16/02/2015 10.00 WIB

<http://www.kemendagri.go.id/pages/sipkd/sistem-informasi-pengelolaan-keuangan-daerah-sipkd>  
Senin, 16/02/2015 10.00 WIB

[http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attachments/article/385/Kajian\\_Legal\\_SIKD\\_Ekobudi\\_Versi2.pdf](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attachments/article/385/Kajian_Legal_SIKD_Ekobudi_Versi2.pdf)  
Senin, 16/02/2015 10.00 WIB

[http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attachments/article/250/Penelitian\\_Legalitas,%20Peluang%20dan%20Hambatan%20E-SIKD\\_TADF\\_2012.pdf](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attachments/article/250/Penelitian_Legalitas,%20Peluang%20dan%20Hambatan%20E-SIKD_TADF_2012.pdf)  
Senin, 16/02/2015 10.00 WIB

<http://repository.ung.ac.id/hasilriset/show/1/42/analisis-implementasi-kebijakan-empat-pilar-pengembangan-universitas-negeri-gorontalo.html>  
Senin, 16/02/2015 10.00 WIB



## KUESIONER

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi

Terimakasih kepada Bapak/Ibu, telah berkenan meluangkan waktu untuk mengisi daftar pertanyaan/ Pernyataan ini, dimohon untuk memberikan tanggapan yang sesuai pernyataan-pernyataan berikut dengan memilih skor yang tersedia dengan tanda (X).

Jika menurut Bapak/ Ibu tidak ada jawaban yang tepat, maka jawaban dapat diberikan pada pilihan yang paling mendekati, Jawaban dituangkan dalam bentuk skala Ordinal berupa angka antara 1 s.d 4 dimana semakin besar angka menunjukkan semakin setuju responden terhadap pertanyaan/ pernyataan.

Dalam pernyataan mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi dibagi menjadi 4 (empat) variabel. Variabel pertama Komunikasi, variabel kedua Sumber Daya, variabel ketiga Disposisi dan variabel keempat adalah Struktur Birokrasi. Skor jawaban adalah sebagai berikut :

Keterangan	(STS) Sangat Tidak Setuju	(TS) Tidak Setuju	(S) Setuju	(SS) Sangat Setuju
Skor	1	2	3	4

**A. Identitas Responden**

1. Nomor Responden : ..... (Diisi oleh Peneliti)
2. Jenis Kelamin :  Pria  Wanita
3. Usia : ..... Tahun
4. Riwayat Pendidikan :  SMA/Sederajat  D1-D3  S1  
 S2  S3
5. Jabatan :  Pimpinan SKPD  
 Kasubbag Keuangan SKPD  
 Bendahara Pengeluaran SKPD

**B. Daftar Pernyataan/ Pertanyaan**

**Komunikasi**

Pernyataan	Penilaian			
	STS	TS	S	SS
	(1)	(2)	(3)	(4)
1. Adanya DIPPEKA sebagai SKPKD yang mengadakan sosialisasi dan pelatihan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) pada SKPD				
2. Adanya sosilisasi dan pelatihan				

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) harus terus dilakukan untuk menyikapi peraturan-peraturan yang selalu dinamis				
3. Adanya materi sosialisasi dan pelatihan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang disampaikan mudah dipahami				
4. Adanya dukungan Pimpinan kepada staf untuk terlaksananya Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)				
5. Adanya kejujuran dan tekad staf untuk melaksanakan tugas dari Pimpinan untuk terlaksananya Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)				

#### Sumber Daya

Pernyataan	Penilaian			
	STS	TS	S	SS
	(1)	(2)	(3)	(4)
1. Adanya jumlah staf dalam melaksanakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sudah memadai				
2. Adanya kemampuan Staf khusus Teknologi Informasi dalam mendukung terlaksananya Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)				
3. Adanya Sarana dan prasarana dalam melaksanakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang sudah memadai				
4. Adanya Anggaran dalam melaksanakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)				

### Disposisi

Pernyataan	Penilaian			
	STS	TS	S	SS
	(1)	(2)	(3)	(4)
1. Adanya Komitmen Pimpinan untuk melaksanakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang berkelanjutan				
2. Adanya tanggungjawab bersama Pimpinan dan Staf atas keberhasilan/ kegagalan melaksanakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)				
3. Adanya penempatan staf yang sesuai dengan kemampuan untuk melaksanakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)				
4. Adanya insentif pada staf pelaksana dalam melaksanakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)				

### Struktur Birokrasi

Pernyataan	Penilaian			
	STS	TS	S	SS
	(1)	(2)	(3)	(4)
1. Adanya Standar Operating Procedure (SOP) dalam melaksanakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)				
2. Adanya pembagian tugas dan fungsi (tupoksi) yang jelas dalam melaksanakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)				
3. Adanya Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang terintegrasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat ( <i>Single System</i> )				